



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN
SUB UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPARDAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
3. NHK : 492174

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.414.875.000

1. Tanah Seluas 3.065 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI
Rp. 229.875.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/21 m2 di LOMBOK TENGAH,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/21 m2 di LOMBOK TENGAH,
HIBAH DENGAN AKTA Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 900 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp.
585.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 21.500.000

1. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
11.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.436.375.000**III. HUTANG** Rp. 197.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.239.375.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.